

**EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN
DI INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA BERDASARKAN INDIKATOR
*ENTERPRISE RISK MANAGEMENT***



Disusun oleh:

RIZMA DRAJAD SITI APRIYANTI

21213011

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JUNI, 2025**

**EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN
DI INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA BERDASARKAN INDIKATOR
*ENTERPRISE RISK MANAGEMENT***

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan
menjadi Sarjana Terapan**



Disusun oleh:

RIZMA DRAJAD SITI APRIYANTI

21213011

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JUNI, 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “**Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management***” yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juni 2025



Rizma Drájad Siti Apriyanti

21213011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management*” disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Pembimbing

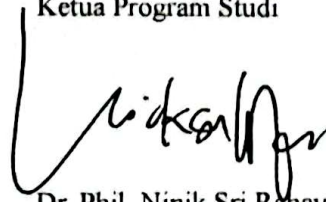


Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev.

182131302

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM

052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management*” telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2025

Tim Penguji

Penguji I,

Penguji II,

Rahima

Amran

Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev.

Dra. Indah Susantun, M.Si.

182131302

883110104

Mengesahkan,

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Nink Sri Rahayu, SE., MM

052130103

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan FBE UII. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wagino, A.Ma dan Ibu Cholifah yang selalu menjadi sumber inspirasi, doa, dan kasih sayang tanpa batas, terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, serta doa yang tak pernah terputus.
2. Kakak tersayang, Ahmad Ardi Drajad Wicaksono, S.H. dan Ainunna Uswatun Hasanah, S.Pd. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Dosen pembimbing, Ibu Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev yang dengan sabar memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Inspektorat DIY, sebagai tempat yang telah memberikan kesempatan dan wawasan dalam bidang pengawasan serta manajemen risiko yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat, Adinda Meisya Gina, Nisa Rosyidah, dan Adinda Khansa Khairunissa yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan dalam setiap proses yang dijalani, terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka sepanjang perjalanan ini.
6. Diri saya sendiri, yang telah berusaha, bertahan, dan terus berjuang hingga titik ini, terima kasih telah melewati segala rintangan dengan penuh ketekunan dan keyakinan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management*”**. Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia dengan tepat waktu. Diharapkan skripsi ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen risiko di lingkup pemerintahan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Atas tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Wagino, A.Ma dan Ibu Cholifah selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan mental, spiritual, dan finansial dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ahmad Ardi Drajad Wicaksono, S.H. dan Ainunna Uswatun Hasanah, S.Pd. selaku kakak kandung dan kakak ipar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, serta saran dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.

6. Bapak Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc. selaku Inspektur Inspektorat DIY beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan serta dukungan selama pelaksanaan magang dan penelitian.
7. Ibu Dian Rohmawati, S.Si., M.A.P. selaku pembimbing industri yang selalu memberikan pengarahan selama pelaksanaan magang dan penelitian.
8. Seluruh pegawai Inspektorat DIY yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik selama pelaksanaan magang dan penelitian.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca.

Yogyakarta, Juni 2025

Rizma Drajad Siti Apriyanti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat Akademik	3
1.4.2 Manfaat Praktikal	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Definisi Manajemen Risiko	4
2.1.2 Jenis-Jenis Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintahan DIY	4
2.1.3 Proses Pengelolaan Risiko.....	5
2.1.4 Definisi <i>Fraud</i>	6
2.1.5 Teori <i>Fraud Triangle</i>	7
2.1.6 Definisi <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	8
2.1.7 Komponen <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)	9
2.2 Penelitian Terdahulu	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	14
3.2 Desain Penelitian	14
3.3 Pendekatan Kuantitatif.....	15

3.3.1	Populasi dan Sampel.....	15
3.3.2	Variabel Penelitian.....	15
3.3.3	Analisis Deskriptif.....	16
3.4	Pendekatan Kualitatif.....	16
3.4.1	Observasi	16
3.4.2	Wawancara <i>Key Informant Interview</i> (KII).....	16
3.4.3	Studi Pustaka	17
3.5	Teknik Keabsahan Data	18
3.6	Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1	Data Umum.....	20
4.1.1	Profil Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.....	20
4.1.2	Visi dan Misi Gubernur DIY	20
4.1.3	Tugas dan Fungsi.....	21
4.1.4	Tujuan dan Sasaran.....	22
4.1.5	Struktur Organisasi	23
4.2	Data Khusus.....	25
4.2.1	Data Demografis Responden.....	25
4.2.2	Penerapan Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.....	27
4.2.3	Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM).....	32
4.2.4	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta	40
BAB V	PENUTUP.....	43
5.1	Kesimpulan.....	43
5.2	Implikasi	44
5.2.1	Implikasi Teoritis	44
5.2.2	Implikasi Praktis.....	45
5.3	Keterbatasan Penelitian	46
5.4	Rekomendasi untuk Peneliti Berikutnya	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Topik Wawancara	16
Tabel 4. 1 Data Demografis Responden.....	25
Tabel 4. 2 Pengelolaan Risiko Kecurangan Berdasarkan Indikator ERM	32
Tabel 4. 3 Persepsi Responden Tentang Efektivitas Penerapan ERM	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep Fraud Triangle	7
Gambar 3. 1 Triangulasi Data Penelitian	18
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Inspektorat DIY.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian (Kuesioner Penelitian).....	52
Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)	56
Lampiran 3: Hasil Pengolahan Data Statistik (SPSS).....	60
Lampiran 4: Surat Keterangan Riset.....	67
Lampiran 5: Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah	68
Lampiran 6: Riwayat Hidup Penulis	69

Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management*

Abstraksi

Pengelolaan risiko kecurangan merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, khususnya di lembaga pengawasan seperti Inspektorat DIY. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY, mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan indikator ERM, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah *mixed method* dengan pendekatan deskriptif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner terhadap seluruh pegawai Inspektorat DIY, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan tiga narasumber dan studi pustaka. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif statistik untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kecurangan telah diterapkan melalui lima komponen utama ERM, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan efektivitas yang baik, tetapi ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya *tools* penilaian risiko dan komunikasi internal. Budaya sadar risiko dan pemanfaatan kanal pelaporan publik menjadi faktor pendukung utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Inspektorat DIY mengembangkan model penerapan ERM yang lebih terstruktur dan kontekstual, memperkuat kapasitas SDM, serta meningkatkan komunikasi risiko yang berkelanjutan.

Kata kunci: pengelolaan risiko kecurangan, *enterprise risk management*, evaluasi risiko

Evaluation of Fraud Risk Management at the Inspectorate DIY Based on Enterprise Risk Management Indicators

Abstract

Fraud risk management is an important part of strengthening accountable and transparent governance, especially in supervisory institutions such as the Inspectorate DIY. This study aims to examine the implementation of fraud risk management in the Inspectorate DIY, evaluate its effectiveness based on ERM indicators, and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The method used is a mixed method with a descriptive approach. Quantitative data was obtained through a questionnaire administered to all employees of the Inspectorate DIY, while qualitative data was obtained through interviews with three informants and literature review. Descriptive statistical analysis was used for quantitative data, and thematic analysis for qualitative data. The results of the study indicate that fraud risk management has been implemented through five main components of ERM, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Although most indicators show good effectiveness, several obstacles were found, such as limited human resources, suboptimal risk assessment tools and internal communication. Risk-aware culture and the utilization of public reporting channels are the main supporting factors. Therefore, this study recommends that the Inspectorate DIY develop a more structured and contextual ERM implementation model, strengthen human resource capacity, and enhance sustainable risk communication.

Key words: fraud risk management, enterprise risk management, risk evaluation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi, baik publik maupun privat dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan pengawasan dalam struktur pemerintahan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) oleh berbagai lembaga meliputi BPKP, Inspektorat Kementerian, Lembaga dan Daerah (Inspektorat DIY, 2020). Inspektorat DIY sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencegah potensi kecurangan (*fraud*) yang dapat menyebabkan kerugian negara serta menurunkan tingkat akuntabilitas publik (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022a).

Kasus kecurangan dalam sektor publik menjadi perhatian global karena dapat merusak tata kelola pemerintahan, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta berdampak negatif terhadap efektivitas kebijakan publik (Christian et al., 2024). Berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2024, sektor pemerintahan mengalami kerugian median sekitar Rp38 Miliar akibat kecurangan, dengan korupsi (56%) sebagai jenis *fraud* yang paling sering terjadi, diikuti oleh penagihan fiktif (26%) dan penggelapan aset (20%) (ACFE, 2024a). Inspektorat DIY di tingkat daerah telah memetakan 17 risiko kecurangan yang tersebar dalam 6 aspek utama, yaitu pelaksanaan pengawasan, transaksi pengeluaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia (SDM), aset dan persediaan, serta teknologi informasi dan sistem komunikasi pelaporan (Inspektorat DIY, 2024). Risiko ini merupakan yang tertinggi dibandingkan jenis risiko lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi DIY tahun 2024 menunjukkan skor 74,60 yang masih

berada dalam kategori waspada, sehingga diperlukan upaya penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko kecurangan secara lebih komprehensif (KPK, 2024).

Enterprise Risk Management (ERM) menjadi pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam sektor publik, termasuk di Inspektorat DIY untuk menghadapi kompleksitas risiko kecurangan. ERM merupakan pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, serta memantau risiko secara menyeluruh, sehingga organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dalam mitigasi risiko kecurangan (Aulia et al., 2024). ERM menekankan pendekatan berbasis risiko yang lebih proaktif, dengan indikator utama seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi (Dwiasnati & Hidayat, 2022).

Namun, penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY, mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan indikator ERM, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mitigasi risiko kecurangan, sehingga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta jika dievaluasi berdasarkan indikator *Enterprise Risk Management*?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengevaluasi pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan indikator *Enterprise Risk Management*.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat akademik hasil studi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam pengelolaan risiko kecurangan di sektor publik, khususnya dalam konteks pengawasan internal di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas ERM dalam mitigasi risiko kecurangan, serta mengisi kesenjangan penelitian terkait evaluasi penerapan ERM di lingkungan pemerintahan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktikal

Manfaat praktikal hasil studi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi komprehensif terhadap penerapan ERM dalam pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY, sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan mitigasi risiko kecurangan.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Inspektorat DIY dalam memperkuat kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kecurangan, serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Manajemen Risiko

Menurut Ansyari (2024), manajemen risiko merupakan upaya mengidentifikasi, menilai, serta mengurangi risiko dalam mengelola ketidakpastian dan memaksimalkan peluang dalam suatu organisasi. Asir et al. (2023) mengungkapkan bahwa manajemen risiko menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga memungkinkan perusahaan mencapai nilai optimal dan memperoleh keuntungan sesuai harapan. Menurut Misra et al. (2020), manajemen risiko yang efektif mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan kemungkinan di masa depan secara proaktif, bukan reaktif, sehingga tidak hanya menekan peluang terjadinya risiko, tetapi juga meminimalkan dampaknya. Berdasarkan definisi manajemen risiko menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko untuk menghadapi ketidakpastian, mengoptimalkan peluang, serta mendukung pencapaian tujuan dan nilai organisasi.

2.1.2 Jenis-Jenis Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintahan DIY

Manajemen risiko yang efektif berperan penting dalam menjamin kesinambungan, reputasi, dan perkembangan bisnis yang stabil. Terdapat empat jenis risiko yang mungkin terjadi di lingkungan Pemda DIY, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau kerugian dari proses internal, kegagalan sistem eksternal, serta faktor sumber daya manusia. Menurut Santana et al. (2023), tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen perusahaan, di mana setiap keputusan perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin timbul.

2. Risiko Strategis

Risiko strategi muncul akibat ketidakakuratan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis, serta ketidakmampuan dalam menyesuaikan

diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Menurut Putri (2018), manajemen risiko strategis adalah metode untuk menentukan langkah dan tindakan dalam mengantisipasi atau mengurangi risiko yang timbul akibat ketidaktepatan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis atau ketidakpatuhan terhadap perubahan peraturan yang berlaku.

3. Risiko *Fraud*

Risiko *fraud* merujuk pada kemungkinan terjadinya tindakan penipuan yang dapat merugikan perusahaan. Menurut Sari & Lestari (2020), risiko *fraud* merupakan potensi yang mencakup adanya kecurangan yang disengaja dalam laporan keuangan, yang dipicu oleh tekanan, peluang, serta rasionalisasi.

4. Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, risiko SPBE mencerminkan kemungkinan munculnya peristiwa yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan penerapan SPBE (KemenPAN-RB, 2020). Menurut Bisma (2022), manajemen risiko SPBE adalah tahapan penting yang perlu dimiliki setiap organisasi guna meningkatkan pencapaian tujuan SPBE di instansi pemerintah, dengan penerapannya berfokus pada membangun budaya kesadaran risiko di kalangan ASN.

2.1.3 Proses Pengelolaan Risiko

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022a), proses pengelolaan risiko meliputi:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko dengan cara meninjau kelemahan pada setiap sub unsur pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan suatu instansi pemerintah serta merumuskan tindakan pengendalian yang dibutuhkan guna mengurangi risiko tersebut. Proses penilaian risiko ini meliputi penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko, dan pelaporan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur pengendalian dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Proses informasi dan komunikasi bertujuan memastikan adanya komunikasi internal maupun eksternal yang efektif pada setiap tahap pengelolaan risiko, mulai dari penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, hingga pelaksanaan kegiatan pengendalian.

5. Pemantauan

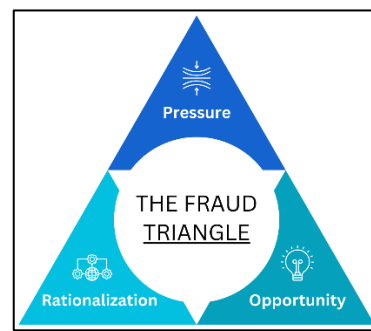
Pemantauan pengelolaan risiko bertujuan memastikan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan mulai dari Gubernur hingga Kepala Seksi/Sub Bagian sesuai kewenangannya, sedangkan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

2.1.4 Definisi *Fraud*

Menurut ACFE (2024), *fraud* adalah tindakan manipulasi atau ketidakjujuran untuk keuntungan pribadi yang menjadi tindak pidana ketika melibatkan penyembunyian atau penggambaran keliru atas fakta material yang merugikan pihak lain. Elisabeth & Simanjuntak (2020) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang melanggar hukum (*illegal acts*) dan mencakup segala bentuk manipulasi atau penyimpangan yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah, baik bagi individu maupun organisasi. Tindakan ini memerlukan upaya deteksi yang akurat dan pencegahan menyeluruh dari pihak auditor untuk memastikan integritas

keuangan dan mencegah kerugian lebih lanjut. *Fraud* dianggap sebagai perbuatan menyimpang yang dilakukan secara sengaja untuk melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu sehingga merugikan pihak lain (Mulqiani, 2021). Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan manipulasi ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pribadi dengan cara menyembunyikan atau memalsukan fakta, sehingga memerlukan deteksi dan pencegahan guna menjaga integritas dan mencegah kerugian.

2.1.5 Teori *Fraud Triangle*



Gambar 2. 1 Konsep Fraud Triangle

Sumber: Cahyono, 2024

Teori *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953 menjelaskan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi merupakan faktor pemicu kecurangan. Melalui hipotesis ini, Cressey berusaha menjawab alasan seseorang melakukan kecurangan (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Risiko kecurangan cenderung meningkat ketika individu mengalami tekanan situasional, memiliki kesempatan, dan rendahnya integritas (Sari & Lestari, 2020). Faktor penyebab kecurangan yang dikemukakan Cressey terdiri atas tiga aspek utama, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan yang memicu seseorang melakukan kecurangan akibat tuntutan gaya hidup, ketidakmampuan finansial, kebiasaan berjudi, upaya untuk menaklukkan sistem, serta rasa ketidakpuasan dalam pekerjaan. Menurut Cahyono (2024), salah satu bentuk tekanan yang mungkin dialami oleh karyawan adalah melakukan penyalahgunaan dana perusahaan akibat dorongan tekanan tertentu yang menekannya.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Cressey berpendapat bahwa penipuan dapat terjadi ketika ada kesempatan, dan kesempatan ini biasanya muncul akibat kelemahan dalam sistem pengendalian, yang memberikan peluang bagi kecurangan di dalam perusahaan (Sari & Lestari, 2020).

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi menggambarkan sikap, perilaku, dan nilai moral yang memungkinkan manajer atau karyawan merencanakan tindakan tidak jujur, terutama ketika berada dalam situasi tekanan tinggi yang membuat mereka membenarkan tindakan tersebut (Cahyono, 2024).

2.1.6 Definisi *Enterprise Risk Management* (ERM)

Menurut Altanashat et al. (2019), *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dalam pengelolaan risiko organisasi, melalui tahapan identifikasi, evaluasi, serta penanganan risiko secara sistematis dan terkoordinasi guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Oydag & Senvar (2020), tujuan utama dari *Enterprise Risk Management* (ERM) yaitu menjaga dan meningkatkan nilai organisasi melalui pengelolaan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis perusahaan. Sakrabani & Ping (2022), mengemukakan bahwa *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan proses berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada upaya meminimalkan risiko, tetapi juga mencakup identifikasi serta pemanfaatan peluang yang melibatkan seluruh elemen organisasi dari dewan direksi hingga karyawan individu, dan juga menjadi bagian penting dari tata kelola, strategi, dan operasional perusahaan. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan pendekatan terpadu dan berkelanjutan dalam mengelola risiko dan peluang secara sistematis di seluruh tingkat organisasi yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan strategis serta menjaga dan meningkatkan nilai organisasi.

2.1.7 Komponen *Enterprise Risk Management* (ERM)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengembangkan kerangka kerja pengendalian yang disebut *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework* sebagai respons terhadap dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dengan menekankan pendekatan pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi, strategis, dan menyeluruh (Lestari & Mayangsari, 2023). Kepatuhan terhadap kerangka kerja ini dikaitkan dengan lingkungan pengendalian yang lebih kuat dan pelaporan yang lebih akuntabel, serta mencerminkan komitmen organisasi terhadap praktik tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab (Park et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan lima komponen utama *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan COSO 2013 sebagai dasar dalam mengevaluasi pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri atas (COSO, 2013):

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencakup seperangkat standar, proses, serta struktur yang berfungsi sebagai landasan utama dalam penerapan pengendalian internal di seluruh organisasi. Manajemen memiliki peran dalam menetapkan kebijakan pada level strategis mengenai pentingnya sistem pengendalian serta standar perilaku yang diharapkan. Lingkungan pengendalian dalam *Framework* ERM 2013 menjadi komponen dasar sebagai fondasi terbentuknya sistem pengendalian internal yang efektif.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses yang bersifat dinamis serta berulang yang berfungsi mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap pencapaian tujuan entitas sebagai dasar dalam menentukan langkah pengelolaannya. Manajemen mempertimbangkan potensi perubahan baik pada lingkungan eksternal maupun model bisnis yang dimiliki yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan *framework* ERM 2013, penilaian risiko mencakup tahapan identifikasi, analisis, dan pemberian respons terhadap risiko.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merujuk pada tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur guna memastikan bahwa arahan manajemen dalam mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dapat terlaksana. Tindakan ini dapat bersifat preventif maupun detektif yang mencakup berbagai aktivitas baik manual maupun otomatis, seperti proses otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, serta evaluasi kinerja bisnis.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pengendalian internal yang merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan organisasi. Komunikasi berlangsung secara internal maupun eksternal dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas pengendalian sehari-hari. Komunikasi membantu setiap individu memahami peran mereka dalam pengendalian internal serta pentingnya pengendalian tersebut bagi keberhasilan pencapaian tujuan.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, secara terpisah, atau melalui kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan keberadaan serta efektivitas lima komponen pengendalian internal, termasuk pengendalian untuk prinsip-prinsip dalam setiap komponennya. Setiap temuan dinilai dan kekurangan yang teridentifikasi disampaikan tepat waktu. Pemantauan berfungsi untuk menilai apakah kontrol pada masing-masing komponen berjalan sebagaimana mestinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
1.	<i>Enterprise Risk Management</i> dalam Mencegah Mendeteksi Kecurangan Parlemen Indonesia (Lestari & Mayangsari, 2023)	Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan ERM terhadap pencegahan dan deteksi <i>fraud</i> .	<i>Mixed method</i> (kualitatif dan kuantitatif)	Pilar COSO ERM berpengaruh signifikan dalam mendeteksi dan mencegah <i>fraud</i> di lingkungan parlemen.
2.	Evaluasi <i>Enterprise Risk Management</i>	Penelitian bertujuan	Metode kualitatif	Penerapan ERM belum efektif sepenuhnya

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
	pada Lembaga XYZ dengan Menggunakan <i>Framework</i> SPBE pada Daftar Risiko Nomor 10-12, 26-28, dan 65-75 (Risky et al., 2024)	mengevaluasi efektivitas ERM pada lembaga sektor publik berdasarkan daftar risiko SPBE		yaitu masih lemah dalam mitigasi dan identifikasi risiko.
3.	Implementasi <i>Enterprise Risk Management</i> pada Proyek-Proyek Strategis Daerah oleh Inpektorat Daerah Kota Blitar (Indarti & Arisyahidin, 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ERM oleh Inspektorat Daerah dalam pengawasan proyek strategis	Metode kualitatif deskriptif	Implementasi ERM masih menghadapi kendala dalam SDM, sistem informasi, dan keterpaduan proses pengawasan.
4.	The Effect of Enterprise Risk Management on Prevention and Detection Fraud in Indonesia's Local Government (Tarjo et al., 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ERM dalam mencegah dan mendeteksi fraud di pemerintah daerah	Metode kuantitatif	Seluruh elemen COSO ERM berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan deteksi kecurangan.
5.	Effectiveness of Enterprise Risk Management Practices: A Case Study (Abidin et al., 2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik ERM diterapkan secara efektif di organisasi	<i>Mixed method</i> (kualitatif dan kuantitatif)	Terdapat kesenjangan antara praktik ERM ideal dan aktual, terutama dalam aspek evaluasi, komunikasi risiko, dan pemantauan.

Sumber: Diolah penulis (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Mayangsari (2023) memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai peran *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam mencegah dan mendeteksi praktik kecurangan di lingkungan lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method*, yaitu melalui wawancara mendalam kepada pengelola risiko serta penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat dalam sistem pengendalian internal. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa delapan pilar utama dalam COSO ERM, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, dan pemantauan, mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap tindakan fraud. Penerapan yang menyeluruh terhadap kerangka kerja ERM tidak hanya mendukung deteksi kecurangan, tetapi juga memperkuat budaya integritas serta akuntabilitas dalam lembaga legislatif.

Penelitian oleh Risky et al. (2024) menitikberatkan pada evaluasi efektivitas implementasi ERM di salah satu lembaga publik di Indonesia yang mengacu pada risiko-risiko berbasis sistem pemerintahan elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada pejabat pengelola risiko serta studi dokumen terhadap kebijakan internal dan daftar risiko lembaga. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara struktural lembaga tersebut telah menetapkan prosedur manajemen risiko dan menunjuk unit-unit pengelola risiko, penerapan ERM belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh. Proses identifikasi dan mitigasi risiko cenderung dilakukan secara reaktif, tanpa perencanaan strategis berbasis risiko. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif.

Penelitian oleh Indarti & Arisyahidin (2024) memberikan gambaran kontekstual yang lebih dekat dengan penelitian skripsi karena fokus pada Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan ERM oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mengawasi proyek-proyek strategis daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen internal yang berkaitan dengan proses pengelolaan risiko. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka kerja ERM, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko, belum optimalnya sistem informasi manajemen risiko, serta lemahnya pemantauan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusi pengawasan serta penyesuaian strategi risiko yang dinamis terhadap kebutuhan lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarjo et al. (2022) meneliti pengaruh ERM terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei terhadap 151 responden dari unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kemudian dianalisis menggunakan regresi linier. Temuan utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa seluruh komponen COSO ERM secara statistik memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah dan mendeteksi

kecurangan. ERM terbukti dapat memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih akuntabel serta memperkuat koordinasi antarpihak dalam sistem pengawasan internal. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya bergantung pada keberadaan prosedur, namun juga pada kualitas pelaksanaan dan integrasi antarelemen dalam proses ERM.

Penelitian oleh Abidin et al. (2019) juga memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai efektivitas ERM melalui pendekatan *mixed-method*, yaitu melalui wawancara terhadap pengelola risiko internal organisasi dan penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan ERM yang ideal menurut teori COSO dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan utama yang ditemukan terletak pada lemahnya komunikasi risiko, minimnya pemantauan sistematis, serta kurangnya evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah mitigasi yang sudah diambil.

Keterbaharuan dari penelitian ini adalah membahas secara spesifik evaluasi pengelolaan risiko kecurangan pada lembaga pengawasan daerah dengan menggunakan pendekatan indikator ERM berdasarkan COSO 2013. Penelitian ini memperluas fokus dari studi sebelumnya yang lebih umum pada pengawasan atau pelaporan keuangan, yaitu dengan menekankan risiko *fraud* secara spesifik di lembaga pengawasan pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah *evaluation research* berbasis *mixed method* yang menggabungkan data kuantitatif dari hasil kuesioner dengan data kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan penerapan ERM secara struktural, tetapi juga mengevaluasi efektivitas fungsionalnya dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan secara lebih komprehensif di Inspektorat DIY.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Cendana No. 40, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55166. *Call Center* 512567, nomor telepon (0274) 562009, *website* <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/>. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 24 Januari 2025.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed method*). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan akurat mengenai penerapan pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan indikator *Enterprise Risk Management* (ERM). Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam kegiatan penelitian bertujuan memperoleh data yang lebih menyeluruh, valid, reliabel, serta objektif (Azhari et al., 2023). Kombinasi dua metode memungkinkan diperolehnya data penelitian yang lebih valid karena informasi yang tidak dapat diverifikasi melalui pendekatan kuantitatif dapat dikonfirmasi menggunakan pendekatan kualitatif atau sebaliknya (Sugiyono, 2019).

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui deskripsi yang mendalam dan menyeluruh. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi serta pandangan informan yang dikumpulkan langsung pada situasi nyata atau konteks alami (Fadli, 2021). Penelitian kuantitatif bertujuan memperoleh informasi mengenai subjek penelitian melalui populasi serta sampel yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan metode yang digunakan (Azhari et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, penelitian kombinasi merupakan metode yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data subjektif yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif dapat diperkuat objektivitasnya menggunakan metode kuantitatif pada cakupan sampel yang lebih luas (Sugiyono, 2019).

3.3 Pendekatan Kuantitatif

3.3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 9 orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), 29 orang auditor, dan 16 orang pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan populasi penuh karena seluruh pegawai Inspektorat DIY pernah mendapatkan penugasan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko sehingga dianggap relevan untuk dijadikan responden. Pendekatan ini dipilih karena ukuran populasi yang relatif kecil memungkinkan pengumpulan data secara menyeluruh, sehingga dapat menghindari bias representasi dan meningkatkan validitas hasil penelitian (Amin et al., 2023). Selain itu, dengan melibatkan seluruh populasi, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan indikator *Enterprise Risk Management* (ERM). Menurut Sugiyono (2019), populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai fokus kajian untuk diambil kesimpulannya. Populasi tidak hanya merujuk pada jumlah objek atau subjek yang diteliti, tetapi juga mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang melekat pada objek atau subjek tersebut.

3.3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian, yaitu:

1. Pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY berdasarkan indikator ERM
Variabel ini diukur melalui indikator ERM berdasarkan COSO 2013 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.
2. Efektivitas pengelolaan risiko kecurangan
Variabel ini diukur melalui tiga pertanyaan yang mengukur persepsi responden terhadap 1) Kemampuan sistem pengelolaan risiko dalam mencegah kecurangan. 2) Dampak ERM terhadap transparansi dan akuntabilitas. 3) Dukungan terhadap ERM.

3.3.3 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang telah diperoleh apa adanya tanpa tujuan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi. Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan tabulasi persentase untuk menunjukkan kecenderungan persepsi responden terhadap masing-masing indikator. Responden berjumlah 54 orang yang terdiri dari PPUPD, auditor, dan pelaksana di Inspektorat DIY. Seluruh responden mengisi kuesioner yang terdiri dari 21 butir pernyataan yang disusun berdasarkan lima komponen utama COSO ERM 2013.

3.4 Pendekatan Kualitatif

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui perencanaan dan pencatatan fenomena secara sistematis, baik dengan terlibat langsung maupun terpisah dari kelompok yang menjadi objek penelitian. (Wade-Berg, 2022). Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4.2 Wawancara *Key Informant Interview* (KII)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau responden dan mencatat atau merekam jawaban yang diberikan (Abdussamad, 2021). *Key Informant Interview* (KII) merupakan metode penelitian untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang spesifik dari narasumber yang memiliki pengetahuan tentang suatu topik dan mengamati langsung pada objek penelitian (Gauchan et al., 2022).

Tabel 3. 1 Topik Wawancara

Kategori Responden	Jumlah	Topik Pertanyaan
- Sekretaris	1	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah tim pengelola risiko secara rutin melakukan identifikasi risiko? Jika ya, seberapa sering identifikasi ini dilakukan? - Apa metode atau alat yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan? - Bagaimana proses validasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi? Apakah ada verifikasi oleh pihak lain atau melalui audit?
- Kasubbag Program dan Monev	1	
- Pengelola Pengawasan	1	

	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada contoh risiko yang berhasil dimitigasi secara efektif? Bagaimana cara mengukur keberhasilannya? - Apakah tim pengelola risiko mengikuti prosedur pengelolaan risiko kecurangan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan? Jika ya, bagaimana proses pengawasan terhadap kepatuhan ini? - Bagaimana Anda menilai efektivitas dari tindakan mitigasi tersebut? Apakah ada indikator khusus yang digunakan? - Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana prosedur pengelolaan risiko tidak diikuti dan bagaimana hal tersebut ditangani? - Apa saja yang menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan monitoring dan evaluasi? - Apakah hasil monitoring dan evaluasi secara rutin dilaporkan kepada manajemen? Jika ya, bagaimana laporan tersebut digunakan? - Apakah Anda melihat penurunan jumlah kasus kecurangan sejak penerapan pengelolaan risiko? Jika ya, bisa Anda jelaskan penurunannya dalam beberapa tahun terakhir? - Apa faktor utama yang menurut Anda berkontribusi pada penurunan tersebut? - Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan kasus kecurangan di sini?
Total	3

Sumber: Diolah penulis (2025)

Tabel 3.1 merupakan rincian pertanyaan yang diajukan kepada *key informant* di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung penelitian terkait evaluasi pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan indikator *Enterprise Risk Management (ERM)*. Topik wawancara disusun berdasarkan lima komponen utama COSO ERM 2013 yang juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kuesioner kepada 54 responden kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan data kualitatif dan kuantitatif agar dapat dianalisis secara integratif.

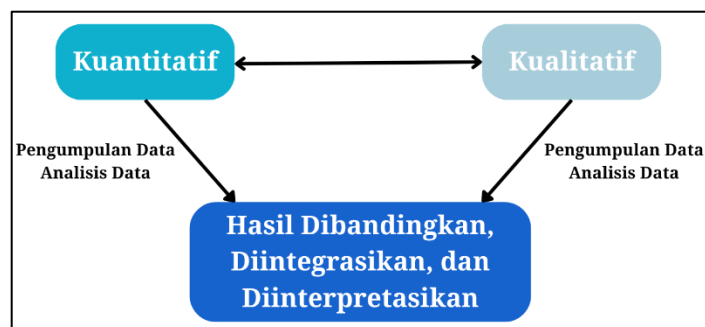
3.4.3 Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pemahaman serta penelaahan berbagai teori dari literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian (Adlini et al., 2022). Melalui metode ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan jurnal yang relevan dengan topik

penelitian serta dokumen atau arsip yang berasal dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta kualitatif yang dilakukan secara terpisah, kemudian hasil dari kedua jenis data tersebut dibandingkan, diintegrasikan, dan diinterpretasikan secara keseluruhan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi antara data kuantitatif dan kualitatif sebagaimana tergambar pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1 Triangulasi Data Penelitian

Sumber: Vebrianto et al., 2020

Pada penelitian kualitatif dilakukan uji keabsahan data yang terdiri dari beberapa tahapan (Vebrianto et al., 2020), yaitu:

1. Uji *credibility*

Pengujian kredibilitas data dilakukan melalui pengamatan, peningkatan ketekunan selama proses penelitian, triangulasi, diskusi bersama rekan sejawat, analisis kasus negatif, serta konfirmasi hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

2. Uji *transferability*

Pengujian *transferability* ini dicapai dengan mendeskripsikan kondisi dan konteks penelitian secara rinci. Pengujian *transferability* dilakukan dengan menyusun laporan secara rinci, jelas, sistematis, serta dapat dipercaya agar pembaca dapat menentukan apakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks atau lokasi lain.

3. Uji *dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan untuk memastikan konsistensi prosedur pengumpulan dan analisis data kualitatif selama proses penelitian berlangsung.

4. Uji *confirmability*

Pengujian *confirmability* bertujuan memastikan bahwa seluruh proses penelitian benar-benar telah dilakukan, sehingga tidak terjadi kondisi di mana hasil penelitian tersedia tanpa adanya proses penelitian yang sebenarnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua macam analisis data (Pane et al., 2021), yaitu:

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik ini digunakan untuk menghitung nilai frekuensi, persentase, dan rata-rata skor dari setiap item pernyataan dalam kuesioner. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan terukur mengenai sejauh mana penerapan ERM telah dilaksanakan serta bagaimana persepsi pegawai terhadap efektivitas pengelolaan risiko kecurangan di lingkungan Inspektorat DIY.

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh melalui wawancara. Analisis dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mereduksi data, mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema yang relevan, serta menyajikannya dalam bentuk narasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam penerapan pengelolaan risiko kecurangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Inspektorat DIY sesuai indikator *Enterprise Risk Management* (ERM).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Profil Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan dalam Bab II Pasal 10 bahwa Inspektorat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024). Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan mendapat pembinaan teknis administratif dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya dikenal sebagai Inspektorat Wilayah II Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian berganti nama menjadi Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.2 Visi dan Misi Gubernur DIY

Inspektorat DIY memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti Visi dan Misi Gubernur DIY yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan publik, Visi yang ditetapkan oleh Gubernur DIY adalah “Terwujudnya Pancamulia masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi”. Visi tersebut mendorong instansi untuk mencapai standar tertinggi dalam pengawasan dan pemeriksaan. Gubernur DIY menetapkan misi-misi untuk mendukung terwujudnya visi tersebut. Kemuliaan martabat manusia Jogja digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia”, yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;

3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

4.1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
9. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;

14. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat, dan;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

4.1.4 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027, Inspektorat memiliki fungsi pengawasan yang diharapkan mendukung tujuan Pembangunan DIY “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dari sisi *Quality Assurance*, hal ini berarti dengan fungsi pengawasan, Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di DIY agar dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 ditetapkan tujuannya adalah terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

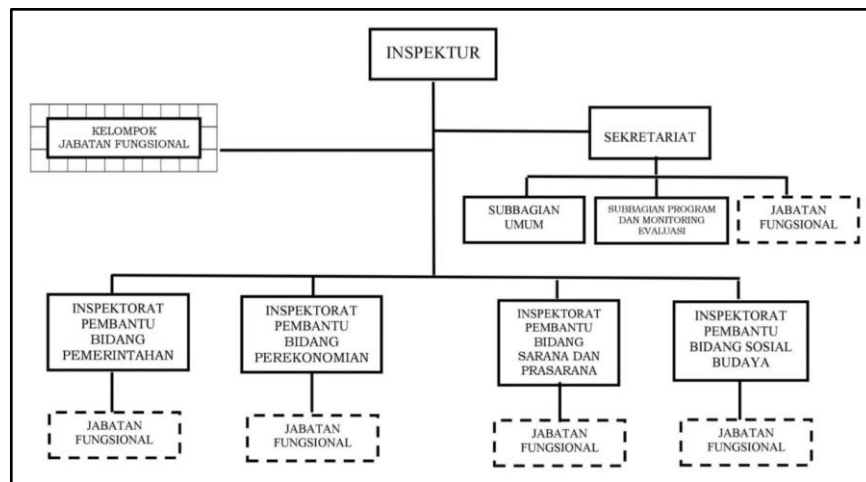
2. Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat DIY, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal;
- b. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi *quality assurance* dan *consulting*;
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

4.1.5 Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, serta secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Terdapat beberapa unit organisasi di bawah Inspektur yang memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari. Berikut merupakan susunan organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Inspektorat DIY

Sumber: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (2022b)

Berikut ini merupakan penjelasan setiap bagian pada struktur organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Inspektur

Inspektur merupakan pimpinan Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat. Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Inspektorat.
- b. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi

Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data, dan sistem informasi serta mengevaluasi pelaksanaan program.
3. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan.
4. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian

Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah bidang perekonomian.
5. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya

Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang sosial budaya untuk meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah bidang sosial budaya.

6. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana

Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase kinerja perangkat daerah bidang sarana prasarana.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

4.2 Data Khusus

4.2.1 Data Demografis Responden

Data demografis responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terangkum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Data Demografis Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	- Laki-laki	26	48.1%
	- Perempuan	28	51.9%
Usia	- 20-29 tahun	7	13%
	- 30-39 tahun	10	18.5%
	- 40-49 tahun	23	42.6%
	- >49 tahun	14	25.9%
Pendidikan	- Diploma 3 (D3)	3	5.6%
	- Diploma 4 (D4)	3	5.6%
	- Strata 1 (S1)	29	53.7%
	- Strata 2 (S2)	15	27.8%
	- Lainnya	4	7.4%
Pengalaman Kerja	- < 5 tahun	5	9.3%
	- 6-10 tahun	10	18.5%
	- 11-15 tahun	21	38.9%
	- >15 tahun	18	33.3%
Jabatan	- PPUPD	9	16.7%
	- Auditor	29	53.7%
	- Pelaksana	16	29.6%

Sumber: Diolah penulis (2025)

Dari data Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa data demografis responden terbagi ke dalam beberapa variabel, yaitu:

1. Jenis Kelamin

Pada data demografis responden diketahui sebanyak 54 orang pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian ini. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih mendominasi dengan jumlah 28 orang (51,9%), sementara responden laki-laki sebanyak 26 orang (48,1%).

2. Usia

Jika dilihat dari rentang usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 40–49 tahun sebanyak 23 orang (42,6%), diikuti oleh usia >49 tahun sebanyak 14 orang (25,9%), dan usia 30–39 tahun sebanyak 10 orang (18,5%). Responden usia produktif muda (20–29 tahun) hanya sebanyak 7 orang (13%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia matang yang berpengalaman dan potensial dalam mendukung proses pengelolaan risiko.

3. Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang Strata 1 (S1) sebanyak 29 orang (53,7%), diikuti oleh Strata 2 (S2) sebanyak 15 orang (27,8%), serta lulusan D3 dan D4 yang masing-masing sebanyak 3 orang (5,6%). Terdapat juga 4 responden (7,4%) yang berasal dari kategori pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang relevan dengan kompleksitas tugas pengawasan dan pengelolaan risiko.

4. Pengalaman Kerja

Dari segi pengalaman kerja, responden dengan masa kerja 11–15 tahun menjadi yang paling dominan sebanyak 21 orang (38,9%), disusul oleh yang memiliki pengalaman kerja >15 tahun sebanyak 18 orang (33,3%), serta 10 orang (18,5%) dengan masa kerja 6–10 tahun. Responden dengan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun hanya 5 orang (9,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pegawai berpengalaman, sehingga memberikan kontribusi jawaban

yang kaya berdasarkan keterlibatan praktis mereka dalam proses manajemen risiko.

5. Jabatan

Dari sisi jabatan, responden didominasi oleh auditor sebanyak 29 orang (53,7%), diikuti oleh pelaksana sebanyak 16 orang (29,6%), dan PPUPD sebanyak 9 orang (16,7%). Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang teknis dan fungsional yang berkaitan langsung dengan proses audit dan pengawasan, sehingga persepsi mereka terhadap pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan indikator ERM dapat dianggap representatif.

4.2.2 Penerapan Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kerangka kerja yang digunakan tidak secara eksplisit merujuk pada *COSO Enterprise Risk Management* (ERM), prinsip-prinsip dalam regulasi tersebut memiliki kesesuaian substansi dengan komponen utama COSO ERM 2013, seperti adanya proses identifikasi risiko, penilaian risiko, penetapan aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pelaporan risiko secara berkelanjutan. Penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY dilakukan melalui:

1. Pengembangan budaya sadar risiko

Inspektorat DIY menanamkan budaya sadar risiko melalui internalisasi nilai-nilai integritas seperti Satriya dan prinsip ASN BerAKHLAK. Nilai ini tidak hanya disosialisasikan, tetapi juga dikonkretkan dalam perilaku dan pengawasan internal. Langkah ini menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah mengintegrasikan budaya sadar risiko ke dalam sistem kerja dan perilaku organisasi secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarti & Arisyahidin (2024) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi, struktur tata kelola, dan nilai-nilai internal berperan penting dalam membentuk program manajemen risiko yang efektif,

karena organisasi yang memiliki budaya sadar risiko cenderung lebih mendukung penerapan strategi pengelolaan risiko.

2. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Pembentukan struktur pengelolaan risiko di Inspektorat DIY dilaksanakan melalui pendekatan yang strategis dan terstruktur, dengan menetapkan pejabat eselon II yaitu Inspektur sebagai penanggung jawab utama. Pelibatan personel dari berbagai bidang seperti auditor internal, inspektur pembantu, PPUPD, dan unit pengelola risiko mencerminkan komitmen institusional untuk membangun sistem manajemen risiko yang bersifat menyeluruh, integratif, dan berbasis tata kelola yang kuat. Koordinasi lintas bidang yang terjadi dalam tim pengelola risiko memberikan jaminan terhadap keberlangsungan proses manajemen risiko yang konsisten, terdokumentasi, dan terukur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Babuci & Birca (2024) yang menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam fungsi audit internal jika disertai dengan praktik audit internal yang terstruktur akan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam organisasi sektor publik dan mendukung kerangka tata kelola yang dibutuhkan.

3. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu:

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko dengan cara meninjau kelemahan pada setiap sub unsur pengendalian internal. Inspektorat DIY pada tahun 2024 telah memetakan adanya 17 risiko kecurangan dalam 6 aspek. Bernardinus Norowisnu, selaku Kasubbag Program dan Monev, menjelaskan bahwa:

“Pada awal disusunnya MR identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode Brainstorming Sessions dengan tahap awal dilaksanakan oleh pemilik risiko di Inspektorat, dilanjutkan dengan Brainstorming bersama dengan Tim Pendamping MR Inspektorat DIY,

di tahun-tahun berikutnya dengan metode yang sama dilakukan pemutakhiran terkait risiko yang masih relevan ataupun yang sudah tidak relevan bagi organisasi (Inspektorat).” (Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang menggabungkan perspektif langsung dari pelaksana teknis (pemilik risiko) dengan sudut pandang teknis audit dari tim pendamping. Pemutakhiran tahunan menjadi bagian penting dari proses ini, memastikan bahwa peta risiko yang dimiliki organisasi tetap dinamis dan relevan terhadap perubahan situasi internal maupun eksternal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latuconsina & Rahim (2021), yang menjelaskan bahwa *brainstorming sessions* dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif memiliki pengaruh signifikan terhadap deteksi potensi kecurangan sehingga tim manajemen risiko dapat mengidentifikasi bentuk, faktor, dan pihak yang terlibat terjadinya kecurangan.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko bertujuan untuk menentukan seberapa besar tingkat risiko kecurangan yang dihadapi berdasarkan kombinasi skor kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) dari risiko tersebut. Setelah menentukan skor kemungkinan dan dampak, kedua skor ini kemudian dikalikan untuk menghasilkan tingkat risiko yang diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Klasifikasi ini penting sebagai acuan dalam menentukan langkah pengendalian dan respon terhadap risiko. Tahapan ini dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara formal dan melibatkan unsur pengawasan internal. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, Serio Agung T, selaku Pengelola Pengawasan yang menyatakan bahwa:

“Proses validasi terhadap risiko yang telah teridentifikasi ditetapkan dengan SK Inspektur atas Penilaian Risiko. Kemudian dilakukan pendampingan oleh Tim Pendampingan Manajemen Risiko yang beranggotakan Auditor dan PPUPD.” (Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses penilaian risiko dilakukan melalui validasi formal berupa penetapan Surat Keputusan Inspektur, yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang audit dan pengawasan pemerintahan. Keterlibatan tim pendamping dalam proses validasi menunjukkan upaya agar proses penilaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Lestari & Mayangsari (2023) yang menyebutkan bahwa penilaian risiko yang dilakukan dengan dukungan sistem dan tim teknis dapat meningkatkan akurasi serta relevansi hasil penilaian dalam konteks organisasi sektor publik.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian di Inspektorat DIY diterapkan melalui berbagai upaya preventif yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kecurangan atau mengurangi dampaknya. Tahapan ini meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur pengendalian serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Salah satu bentuk kegiatan pengendalian dijelaskan oleh Totok Purwoirawan, selaku Sekretaris Inspektorat DIY, yang menyatakan bahwa:

*“Contoh risiko: suap/gratifikasi oleh auditi kepada tim audit. Mitigasinya berupa melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja, melakukan evaluasi atas kepuasan pemangku kepentingan secara berkala dan memuat pernyataan/pertanyaan terkait praktek suap dan gratifikasi dan melakukan sosialisasi kode etik APIP kepada seluruh pegawai.”
(Wawancara Januari, 2025).*

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kultural melalui internalisasi nilai integritas dan penguatan kesadaran anti-kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansyari (2024) yang menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko yang telah

diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat DIY menerapkan strategi pengendalian yang mencakup dua aspek utama, yaitu pencegahan dan deteksi dini.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan komponen esensial dalam setiap tahapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY. Proses ini melibatkan penyampaian informasi yang akurat dan relevan, baik secara internal antarpelaksana maupun secara eksternal kepada pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dari proses identifikasi risiko, penilaian, hingga pelaksanaan tindakan pengendalian. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menekankan bahwa tahapan informasi dan komunikasi dalam manajemen risiko sangat penting untuk mendukung perencanaan strategis, alokasi sumber daya yang tepat, serta meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses (Andersson et al., 2024).

e. Pemantauan

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilakukan oleh Inspektorat DIY selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya. Tahapan ini melibatkan tindakan terhadap risiko baru yang teridentifikasi selama proses pemantauan. Ketika risiko baru muncul, tim segera melakukan investigasi untuk memahami penyebab, dampak, dan lingkup risiko tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Bernardinus Norowisnu, selaku Kasubbag Program dan Monev yang menyatakan bahwa:

“Inspektorat melakukan monitoring internal setiap triwulan dengan dalam bentuk laporan risk event yang berisi kejadian risiko, uraian, dan langkah penanganan dan keterangan lain yang diperlukan.”
(Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa di Inspektorat DIY terdapat sistem pelaporan berkala yang terstruktur dan terdokumentasi, di mana setiap kejadian risiko dicatat secara rinci untuk dianalisis dan ditindaklanjuti oleh tim pengelola risiko. Inspektorat DIY telah mengembangkan suatu sistem pemantauan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pengambilan

keputusan strategis. Laporan *risk event* triwulanan berperan sebagai alat kontrol yang memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi sejauh mana risiko telah berhasil dikendalikan, sekaligus sebagai detektor awal terhadap potensi risiko baru yang muncul akibat perubahan kebijakan, struktur organisasi, atau dinamika eksternal lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abikoye et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan secara berkala memperkuat manajemen risiko melalui pengawasan yang terus-menerus, peningkatan ketepatan dalam mendeteksi risiko, serta peningkatan efisiensi operasional.

4.2.3 Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management* (ERM)

Evaluasi terhadap penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY dilakukan menggunakan lima komponen utama dalam kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan COSO 2013, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan indikator ERM tercantum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Pengelolaan Risiko Kecurangan Berdasarkan Indikator ERM

Komponen COSO ERM 2013	Indikator Penilaian	Frekuensi Setuju/Sangat Setuju	Persentase Setuju/Sangat Setuju
Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)	- Nilai-nilai integritas dan etika telah ditanamkan dan dipahami oleh seluruh pegawai.	53	98.14%
	- Struktur organisasi mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	53	98.14%
	- Terdapat komitmen dan keteladanan pimpinan terkait prinsip integritas dan transparansi dalam pengelolaan risiko kecurangan.	52	96.2%
Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	- Tujuan organisasi telah ditetapkan secara jelas dan terukur.	54	100%
	- Inspektorat DIY secara berkala mengidentifikasi potensi risiko kecurangan atas peristiwa eksternal.	53	98.14%
	- Inspektorat DIY secara berkala mengidentifikasi potensi risiko	53	98.14%

Komponen COSO ERM 2013	Indikator Penilaian	Frekuensi Setuju/Sangat Setuju	Persentase Setuju/Sangat Setuju
	kecurangan atas peristiwa internal.		
	- Setiap unit kerja didorong untuk melaporkan indikasi risiko <i>fraud</i> .	52	96.2%
	- Risiko kecurangan dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.	53	98.14%
	- Penilaian risiko dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.	53	98.14%
Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)	- Kebijakan-kebijakan di Inspektorat DIY telah efektif dalam merespons risiko yang terjadi.	53	98.14%
	- Prosedur pengendalian internal dijalankan secara konsisten.	52	96.2%
	- Prosedur-prosedur di Inspektorat DIY telah efektif dalam merespons risiko yang terjadi.	53	98.14%
	- Terdapat mekanisme yang mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan anti- <i>fraud</i> .	52	96.2%
Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)	- Informasi terkait risiko kecurangan disampaikan secara terbuka dan tepat waktu.	46	85.1%
	- Informasi yang dikomunikasikan bersifat relevan.	49	90.74%
Aktivitas Pemantauan (<i>Monitoring Activities</i>)	- Proses pengelolaan risiko dikaji ulang dan diperbarui secara berkala.	52	96.2%
	- Evaluasi terhadap pengendalian risiko dilakukan secara objektif.	52	96.2%
	- Inspektorat DIY melakukan tindak lanjut atas kekurangan dalam proses pengelolaan risiko berdasarkan hasil evaluasi.	52	96.2%

Sumber: Diolah penulis (2025)

Dari data Tabel 4.2 dapat dilihat indikator-indikator ERM berdasarkan COSO 2013 yang terbagi ke dalam lima variabel komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Variabel lingkungan pengendalian (*control environment*) yang mencakup tiga indikator menunjukkan penerapan yang sangat baik di Inspektorat DIY. Sebanyak 53 responden (98,14%) menyatakan setuju terhadap indikator nilai-nilai integritas

dan etika telah ditanamkan dan dipahami oleh seluruh pegawai, serta struktur organisasi mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Selain itu, 96,2% responden menyatakan bahwa terdapat komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menegakkan prinsip integritas dan transparansi. Persentase ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip lingkungan pengendalian di Inspektorat DIY telah terlaksana secara menyeluruh dan diterima secara positif oleh mayoritas pegawai.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Serio Agung T, selaku Pengelola Pengawasan, yang menyatakan bahwa:

“.....komitmen petinggi instansi yang disuarakan dan dilakukan secara riil (baik lisan maupun perilaku); dukungan tim pendampingan yang benar-benar mengerti manajemen risiko.....” (Wawancara Januari, 2025).

Totok Purwoirawan, selaku Sekretaris Inspektorat DIY, menambahkan:

“.....melakukan sosialisasi kode etik APIP kepada seluruh pegawai.....” (Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan Bapak Rio menegaskan bahwa aspek keteladanan pimpinan dan kompetensi teknis dalam mendampingi proses manajemen risiko menjadi faktor penting dalam menguatkan kontrol lingkungan. Selain itu, langkah konkret menurut Bapak Totok juga mencerminkan internalisasi nilai etika secara institusional, yang memperkuat budaya organisasi berbasis integritas. Jika dikaitkan dengan teori dari COSO (2013), hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di Inspektorat DIY telah memenuhi salah satu prasyarat utama dari sistem pengendalian internal yang efektif. COSO menekankan bahwa lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi komponen lain dalam pengelolaan risiko, karena nilai, struktur, dan keteladanan pimpinan akan mempengaruhi seluruh perilaku organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Proses penilaian risiko di Inspektorat DIY telah diterapkan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini tercermin dari tingginya persentase 54 responden (100%), yang menyatakan bahwa tujuan organisasi telah dirumuskan secara jelas dan terukur. Sebesar 98,14% responden menyatakan bahwa identifikasi risiko dilakukan secara

berkala terhadap kejadian internal dan eksternal, serta analisis dan penilaian risiko dilakukan secara sistematis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya terhadap organisasi. Data ini menunjukkan bahwa Inspektorat DIY tidak hanya memahami pentingnya identifikasi risiko, tetapi juga telah mengembangkan sistem yang memungkinkan pelaksanaan penilaian risiko secara sistematis, terdokumentasi, dan relevan dengan dinamika lingkungan operasional.

Pelibatan seluruh unit kerja dalam pelaporan risiko sebagaimana diungkapkan 96,2% responden, menunjukkan bahwa penilaian risiko telah melekat pada perilaku dan tanggung jawab kolektif organisasi. Hasil penelitian ini diperkuat oleh pernyataan Serio Agung T, selaku Pengelola Pengawasan dalam wawancara yang menyebutkan bahwa:

“Pegawai dengan kesadaran sendiri melaporkan dan berani menolak gratifikasi.” (Wawancara, Januari 2025).

Kesadaran individu dalam mengenali dan merespons potensi risiko *fraud* secara mandiri mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai integritas sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Mayangsari (2023) sejalan dengan penelitian ini, yang menekankan bahwa penilaian risiko merupakan salah satu komponen inti dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah menerapkan prinsip-prinsip COSO ERM 2013 dalam aspek penilaian risiko secara konsisten.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Hasil analisis data memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi positif terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian internal di Inspektorat DIY. Sebanyak 98,14% responden menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam merespons risiko yang terjadi, sementara 96,2% responden menyatakan bahwa prosedur pengendalian internal dijalankan secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa Inspektorat DIY tidak hanya memiliki sistem kebijakan formal, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan secara

berkelanjutan. Selain itu, 98,14% responden meyakini bahwa prosedur yang dimiliki oleh instansi telah efektif dalam menangani risiko, sedangkan 96,2% responden menyatakan bahwa terdapat mekanisme pengawasan yang mengatur kepatuhan terhadap kebijakan anti-*fraud*. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pengendalian di Inspektorat DIY telah mencakup dimensi preventif dan detektif, yang bertujuan menjaga integritas pelaksanaan tugas serta memperkuat upaya mitigasi terhadap risiko kecurangan.

Penerapan aktivitas pengendalian ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Serio Agung T, selaku Pengelola Pengawasan yang menyatakan bahwa:

“Suap/gratifikasi oleh auditi kepada tim audit dinilai dari kemauan pelaporan kejadian gratifikasi yang ada oleh pegawai dan kenaikan nilai survey kepuasan masyarakat. Sedangkan penyalahgunaan/penggelapan aset Inspektorat dinilai dengan adanya pemutakhiran Kartu Inventaris Barang (KIR) secara berkala dapat diketahui kondisi barang secara lebih up to date.” (Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Inspektorat DIY tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga mengedepankan indikator keberhasilan yang terukur dan berbasis data, seperti tingkat pelaporan gratifikasi secara sukarela dan peningkatan kepuasan masyarakat, serta pemutakhiran aset secara berkala. Temuan ini selaras dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka COSO (2013), bahwa aktivitas pengendalian merupakan bentuk konkret dari kebijakan dan prosedur yang diimplementasikan di berbagai tingkatan organisasi, termasuk dalam aktivitas operasional sehari-hari untuk memitigasi risiko dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Prosedur-prosedur tersebut tidak hanya mencakup instrumen administratif, tetapi juga teknologi, pengawasan rutin, dan keterlibatan aktif pegawai.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Hasil penelitian terhadap variabel informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Inspektorat DIY memiliki persepsi positif terhadap efektivitas informasi dan komunikasi terkait risiko yang tersedia. Sebesar 85,1% responden menyatakan bahwa informasi terkait risiko kecurangan disampaikan

secara terbuka dan tepat waktu yang mencerminkan adanya upaya institusi dalam membangun komunikasi yang transparan dan responsif terhadap isu-isu risiko yang berpotensi mengganggu integritas organisasi. Selain itu, 90,74% responden menyatakan bahwa informasi yang dikomunikasikan bersifat relevan, menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan tugas dan pengambilan keputusan di lingkungan kerja.

Namun, dibandingkan dengan empat komponen lainnya dalam kerangka COSO ERM 2013, variabel informasi dan komunikasi menunjukkan tingkat persetujuan paling rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jawaban setuju dan sangat setuju yang lebih kecil dibandingkan variabel lain, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek keterbukaan dan kelengkapan informasi. Kelemahan dalam komunikasi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Totok Purwoirawan, selaku Sekretaris Inspektorat DIY, yang menyatakan bahwa:

“Contohnya, ketika proses FGD dalam rangka verifikasi hasil penilaian risiko kecurangan tidak dilakukan, maka hasil penilaian risiko tersebut tidak terkomunikasikan secara menyeluruh kepada seluruh pemilik risiko. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap risiko kecurangan itu sendiri. Akibatnya, informasi yang seharusnya menjadi dasar untuk tindakan pengendalian tidak tersampaikan secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan reviu secara berkala untuk menilai apakah mitigasi risiko yang ada sudah efektif atau justru perlu dilakukan modifikasi terhadap mitigasi yang telah disusun.” (Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa salah satu penyebab utama dari tidak optimalnya proses komunikasi risiko adalah keterbatasan pemahaman pegawai terhadap substansi risiko kecurangan. Ketidakterlibatan penuh dalam proses komunikasi, seperti FGD, menyebabkan informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pemilik risiko secara merata, sehingga dapat melemahkan efektivitas respons risiko. Hal ini sesuai dengan teori dalam COSO (2013), yang menyatakan bahwa proses komunikasi harus mencakup pelaporan berkala kepada pimpinan serta pertukaran umpan balik dari pemangku kepentingan untuk memastikan sistem pengelolaan risiko tetap adaptif dan tepat sasaran.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemantauan risiko di Inspektorat DIY telah diterapkan secara optimal, ditandai dengan tingginya tingkat persetujuan responden terhadap tiga indikator utama. Sebesar 96,2% responden menyatakan bahwa proses pengelolaan risiko secara rutin dikaji ulang dan diperbarui, evaluasi pengendalian dilakukan secara objektif, serta tindak lanjut terhadap kekurangan yang ditemukan dijalankan dengan baik. Pernyataan Bernardinus Norowisnu, selaku Kasubbag Program dan Money, memperkuat temuan tersebut:

“Secara triwulanan dilakukan money yang dilaporkan kepada manajemen. Laporan yang disampaikan dimanfaatkan untuk melihat apabila risiko terjadi apakah rencana mitigasi yang dirancang mampu mengatasi keterjadian risiko, yang kemudian digunakan sebagai masukan dalam perbaikan atau untuk mengidentifikasi risiko kecurangan di tahun berikutnya.” (Wawancara Januari, 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa evaluasi triwulanan digunakan tidak hanya sebagai sarana pelaporan formal, melainkan sebagai alat untuk mengukur efektivitas strategi mitigasi dan menyesuaikan respons terhadap risiko berdasarkan kondisi aktual. Pemantauan ini mengevaluasi keberhasilan pengendalian dalam mengurangi risiko yang tercatat di *risk register* serta mendeteksi potensi risiko baru akibat perubahan kebijakan atau kondisi operasional. Hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan untuk memastikan pengendalian tetap efektif dan relevan. Temuan ini sesuai dengan teori dalam kerangka COSO (2013), yang menyatakan bahwa evaluasi pengendalian risiko harus dilakukan secara berkala dan temuan evaluasi harus dilaporkan tepat waktu kepada manajemen untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis.

Evaluasi efektivitas penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY dilakukan berdasarkan tiga indikator utama yang diukur melalui persepsi responden terhadap sistem manajemen risiko berbasis *Enterprise Risk Management* (ERM). Ketiga indikator tersebut mencakup kemampuan sistem dalam mencegah kecurangan, kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta tingkat

dukungan terhadap penerapan ERM secara menyeluruh. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Persepsi Responden Tentang Efektivitas Penerapan ERM

Deskripsi	Frekuensi Setuju/Sangat Setuju	Persentase Setuju/Sangat Setuju
Saya merasa sistem pengelolaan risiko saat ini mampu mencegah kecurangan secara efektif.	50	92.5%
Penerapan ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	50	92.5%
Saya mendukung penerapan ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) secara menyeluruh di lingkungan kerja.	51	94%

Sumber: Diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa sebanyak 50 responden (92,5%) menyatakan bahwa sistem pengelolaan risiko yang diterapkan saat ini mampu mencegah kecurangan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya keyakinan kuat bahwa ERM telah diimplementasikan tidak hanya sebagai prosedur formalitas, tetapi telah menjadi alat strategis dalam mendeteksi dan mengendalikan risiko kecurangan secara nyata. Selain itu, 92,5% responden juga menilai bahwa penerapan ERM telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja. Penilaian ini mencerminkan bahwa keberadaan ERM tidak hanya memperkuat mekanisme kontrol internal, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Bahkan, dukungan terhadap penerapan ERM secara menyeluruh di lingkungan kerja ditunjukkan oleh 94% responden yang mengindikasikan bahwa ERM telah memperoleh penerimaan positif dari pegawai lintas bidang dan level jabatan.

Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin et al. (2019), yang menekankan bahwa praktik ERM yang efektif mensyaratkan adanya keterlibatan kolaboratif antara manajemen, staf, dan pemangku kepentingan dalam seluruh siklus pengelolaan risiko dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ERM tidak dapat dicapai secara *top-down* semata, tetapi memerlukan partisipasi lintas sektor yang terkoordinasi dan saling mendukung dalam menciptakan sistem pengendalian yang komprehensif.

Tingginya tingkat persetujuan ini mencerminkan keberhasilan ERM dalam menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya manajemen risiko, serta memperkuat integrasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam aktivitas pengawasan internal. Secara keseluruhan, keterkaitan antara efektivitas penerapan ERM dengan lima indikator utama COSO 2013 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah menerapkan ERM secara sistematis dan berkelanjutan. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori-teori yang telah digunakan dalam analisis sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai bagaimana penerapan ERM di lembaga pengawasan daerah dapat diimplementasikan secara fungsional dan efektif, serta memberikan kontribusi pada penguatan tata kelola organisasi publik yang lebih akuntabel dan transparan.

4.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY tidak terlepas dari keberadaan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun kendala yang menghambat proses implementasi. Faktor pendukung utama yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Penerapan budaya Satriya dan prinsip ASN BerAKHLAK pegawai Pemda DIY
Budaya ini mendorong pegawai untuk menjunjung tinggi integritas, sehingga pengendalian risiko lebih efektif. Organisasi dengan budaya dan nilai-nilai sadar risiko akan lebih mudah dalam menerapkan serta menjalankan proses ERM (Indarti & Arisyahidin, 2024).
2. Komitmen pimpinan dan keteladanan
Pimpinan memberikan contoh langsung dalam menjalankan prinsip integritas dan transparansi, sehingga menjadi teladan bagi seluruh pegawai dalam menerapkan nilai-nilai anti kecurangan. Komitmen pimpinan tidak hanya terlihat dari dokumen formal atau pernyataan tertulis, tetapi juga melalui tindakan nyata (Babuci & Birca, 2024).
3. Menjaga tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Inspektorat DIY aktif menjaga tingkat SPIP dengan menerapkan langkah-langkah sistematis dalam pengelolaan risiko. Upaya ini menunjukkan kesadaran

institusional terhadap pentingnya tata kelola yang andal dalam pencegahan kecurangan (Goleman, 2019).

4. Tersedianya E-Lapor dan WBS (*Whistleblowing System*) yang memadai
Sistem pengaduan publik (E-Lapor) dan WBS (*Whistleblowing System*) yang terintegrasi melalui laman *lapor.jogjaprovo.go.id* telah dimanfaatkan sebagai media untuk menampung aduan masyarakat. Ketersediaan kanal pelaporan ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (Rosita & Asrini, 2022).

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan dalam penerapan pengelolaan risiko kecurangan antara lain:

1. Waktu dan ketersediaan SDM yang terbatas
Pelaksanaan pengelolaan risiko belum optimal untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam proses monev. Tim manajemen risiko di Inspektorat DIY juga masih tergabung dalam satu tim umum tanpa adanya tim khusus yang fokus pada penanganan risiko kecurangan. Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan jumlah SDM dan waktu yang tersedia, sehingga upaya untuk menangani risiko kecurangan secara mendalam belum dapat dilakukan secara optimal (Lestari & Mayangsari, 2023).
2. Informasi dan komunikasi yang belum optimal
Keterbatasan dan kurangnya transparansi menjadi faktor yang membuat informasi dan komunikasi perlu dievaluasi. Informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk memastikan keabsahan informasi yang diterima oleh personal yang bertanggung jawab atas pengendalian internal (Tarjo et al., 2022).
3. Keterbatasan *tools* untuk aktivitas menilai risiko
Keterbatasan *tools* mengacu pada kurangnya instrumen atau perangkat bantu yang memadai dalam penilaian risiko secara efektif. Hal ini dapat menghambat akurasi dan efisiensi karena pegawai kesulitan dalam memetakan risiko secara sistematis dan terdokumentasi sesuai standar manajemen risiko yang berlaku (Abidin et al., 2019).

4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap risiko kecurangan

Sebagian pegawai belum memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen risiko, terutama terkait risiko kecurangan. Hal ini menyebabkan informasi hasil penilaian risiko tidak sepenuhnya terkomunikasikan secara efektif kepada seluruh pemilik risiko (Indarti & Arisyahidin, 2024).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY yang dianalisis melalui pendekatan indikator *Enterprise Risk Management* (ERM) COSO 2013, maka diperoleh tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penerapan pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat DIY telah menunjukkan adanya sistem manajemen risiko yang berjalan secara terstruktur, komprehensif, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Proses pengelolaan risiko mencakup lima tahapan utama, mulai dari identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian hingga pemantauan risiko secara berkala. Pelaksanaan pengelolaan risiko ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko yang secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip COSO ERM 2013. Pendekatan yang digunakan tidak hanya administratif, namun juga bersifat strategis dan partisipatif yang melibatkan auditor, PPUPD, dan pelaksana. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan budaya integritas melalui nilai-nilai Satriya dan ASN BerAKHLAK yang telah melekat dalam perilaku organisasi. Proses identifikasi risiko dilakukan secara kolaboratif melalui forum diskusi teknis, sementara langkah pengendalian mencerminkan adanya kombinasi antara mekanisme formal dan pendekatan preventif berbasis etika organisasi. Pada praktiknya, pelaksanaan pengelolaan risiko ini juga menunjukkan respons adaptif terhadap risiko yang dinamis, termasuk penyesuaian terhadap risiko baru melalui proses *monitoring* dan evaluasi triwulanan.
2. Evaluasi terhadap penerapan pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan indikator ERM menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah mengadopsi dan mengimplementasikan komponen utama dalam kerangka COSO 2013 secara relatif optimal. Lingkungan pengendalian didukung oleh keteladanan pimpinan, struktur organisasi, dan internalisasi nilai etika kerja. Penilaian risiko telah dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit kerja, serta

didasarkan pada kombinasi tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Aktivitas pengendalian disusun melalui rencana tindak pengendalian yang bersifat preventif dan korektif. Sementara itu, komponen informasi dan komunikasi menjadi aspek yang masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi risiko dan peningkatan pemahaman substansi risiko di tingkat pelaksana teknis. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam mitigasi. Berdasarkan hal tersebut, kelima komponen ERM telah membentuk suatu siklus pengelolaan risiko yang tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kecurangan.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari unsur pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi budaya organisasi berbasis integritas, komitmen pimpinan, pemanfaatan kanal pelaporan publik, serta upaya mempertahankan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sementara itu, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman risiko yang belum merata, serta belum optimalnya sarana komunikasi dan perangkat bantu dalam penilaian risiko. Meskipun demikian, penerapan manajemen risiko telah memperoleh penerimaan luas dari pegawai dan dinilai berkontribusi pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas organisasi.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen risiko kecurangan di sektor publik, khususnya dalam konteks penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan kerangka COSO 2013. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko tidak selalu harus merujuk secara eksplisit pada kerangka internasional seperti COSO, namun tetap dapat berjalan efektif apabila substansi prinsip-prinsip ERM telah terintegrasi ke dalam regulasi dan budaya organisasi lokal. Hal ini memperluas pemahaman teoretis

bahwa pengelolaan risiko kecurangan di sektor publik memerlukan penyesuaian konteks kelembagaan, nilai budaya, serta struktur birokrasi tanpa mengabaikan esensi sistemik dari manajemen risiko. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peran budaya organisasi, komitmen pimpinan, dan pelibatan lintas fungsi dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian risiko. Oleh karena itu, hasil ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan ERM sebagai upaya mendukung sistem manajemen risiko di lingkungan organisasi pemerintah.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Inspektorat DIY, yaitu sebagai berikut:

1. Inspektorat DIY dapat menginisiasi pengembangan model penerapan ERM yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi lingkungan pemerintah daerah. Mengingat dasar pelaksanaan pengelolaan risiko masih merujuk pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2022, maka pengembangan model ERM yang disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi lokal akan menjadi kontribusi strategis bagi sistem pengendalian pemerintah daerah.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan sosialisasi berkelanjutan terkait manajemen risiko kecurangan dapat diambil untuk mengatasi keterbatasan pemahaman yang masih ditemukan di beberapa lini pelaksana teknis. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui program internalisasi konsep risiko, studi kasus, simulasi pelaporan risiko yang realistis, serta pemberian modul pelatihan yang mudah diakses.
3. Inspektorat DIY dapat memperkuat mekanisme komunikasi risiko secara internal agar lebih terbuka, sistematis, dan menjangkau seluruh pemangku risiko. Sistem komunikasi dan informasi perlu dikembangkan lebih inklusif, misalnya melalui forum diskusi rutin antar unit kerja, pelatihan tatap muka, atau penyediaan media informasi risiko yang mudah diakses. Komunikasi dua arah juga penting untuk menampung umpan balik dari pelaksana teknis mengenai efektivitas pengendalian dan kendala lapangan.
4. Inspektorat DIY dapat mengembangkan atau mengadopsi alat bantu (*tools*) penilaian risiko yang lebih sistematis dan terstandar. Keterbatasan alat bantu

menjadi salah satu hambatan dalam pemetaan risiko yang akurat. Penggunaan aplikasi digital berbasis risiko atau formulir evaluasi berbobot dapat membantu tim pengelola risiko untuk menilai kemungkinan dan dampak risiko secara objektif, serta akan mempermudah dokumentasi dan pelacakan risiko dari waktu ke waktu, sehingga peta risiko organisasi menjadi lebih akurat, adaptif, dan terintegrasi dengan sistem pengawasan internal.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian diantaranya:

1. Keterbatasan pada akses populasi sebagai responden kuesioner sehingga secara statistik membatasi generalisasi temuan. Meskipun pendekatan ini bertujuan menghindari bias representasi, ukuran populasi yang kecil secara statistik membatasi generalisasi temuan.
2. Wawancara hanya dilakukan kepada tiga orang *key informant*. Hal ini berpotensi melewatkan pandangan dari unit-unit teknis lainnya yang mungkin memiliki pengalaman berbeda.
3. Analisis hanya menggunakan statistik deskriptif berbasis distribusi normal sederhana tanpa uji normalitas atau inferensial lanjut, sehingga hasilnya lebih bersifat menggambarkan kondisi aktual secara eksploratif daripada menguji hubungan kausal antar variabel.

5.4 Rekomendasi untuk Peneliti Berikutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator *Enterprise Risk Management*, maka rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Peneliti selanjutnya dapat menjangkau lebih banyak informan dari berbagai unit kerja atau jabatan strategis agar menghasilkan variasi perspektif yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model evaluasi menggunakan analisis statistik lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

3. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan COSO 2017 untuk mengkaji risiko kecurangan dari perspektif strategis, khususnya pada instansi dengan manajemen risiko yang telah terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abidin, H. Z., Rasid, S. Z. A., Khalid, H., Basiruddin, R., & Baskaran, S. (2019). Effectiveness of Enterprise Risk Management Practices: A Case Study. *Business Management and Strategy*, 10(2), 213. <https://doi.org/10.5296/bms.v10i2.15800>
- Abikoye, B. E., Akinwunmi, T., Adelaja, A. O., Umeorah, S. C., & Ogunsuji, Y. M. (2024). Real-time Financial Monitoring Systems: Enhancing Risk Management Through Continuous Oversight. *GSC Advanced Research and Reviews*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.20.1.0287>
- ACFE. (2024a). Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*.
- ACFE. (2024b). *What Is Fraud?* <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Altanashat, M., Dubai, M. al, & Alhety, S. (2019). The Impact of Enterprise Risk Management on Institutional Performance in Jordanian Public Shareholding Companies. *Journal of Business & Retail Management Research*, 13(3), 256–268. <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v13is03/art-23>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Andersson, M. G., Elving, J., Nordkvist, E., Mader, A., Menning, A., Kowalczyk, J., Lindemann, A.-K., Zupanec, M., Bueser, T., Dendler-Rafael, L., Tuominen, P., Joutsen, S., Suomi, J., Siekkinen, K., Fels-Klerx, H. J. van der, Borges, J., & Koeppel, D. (2024). Enhanced Communication in Risk Analysis (ENCOMRAN): Final Report. *EFSA Supporting Publications*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2024.en-8588>
- Ansyari, S. (2024). Implementation of Risk Management in Strategic Decision Making. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.62504/t7c2r379>
- Asir, M., Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i1.844>
- Aulia, I. F., Lestari, D., & Putri, P. (2024). Enterprise Risk Management dalam Mendeteksi dan Mencegah Terjadinya Fraudulent Financial Statements Enterprise Risk Management in Detecting and Preventing Fraudulent Financial Statements. *Islamic Micro Finance Journal*, 1(3), 148–160.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Social Science Research*, 3(2), 8010–8025.
- Babuci, P., & Birca, A. (2024). *The Influence of Internal Audit on The Effectiveness*

- of Risk Management in The Public Sector*. 265–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.53486/isca2024.33>
- Bisma, R. (2022). Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan. *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, 6(2), 73–79. <https://doi.org/10.26740/jieet.v6n2.p73-79>
- Cahyono, A. N. (2024). Analisis Peran Inspektorat Dalam Menyelesaikan Temuan Audit Menggunakan Konsep Fraud Triangle. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Volume*, 10, 294–303.
- Christian, N., Arlina, Tryany, J., & Liang, V. L. (2024). Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 16(1), 77–95. <https://doi.org/10.37151/jsma.v16i1.173>
- COSO. (2013). COSO Internal Control - Integrated Framework (2013). *KPMG International*, 1–8.
- Dwiasnati, S., & Hidayat, R. R. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Menggunakan COSO: Enterprise Risk Management Framework Integrated Pada PT ALPHANET. *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi*, 8(2), 66–72. <https://doi.org/10.34010/jtk3ti.v8i2.7845>
- Elisabeth, D. M., & Simanjuntak, W. (2020). Analisis Review Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 4(1), 9–18. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol4no1.pp9-18>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gauchan, D., Joshi, B. K., & Ayer, D. K. (2022). *Key Informant Survey/Interview (KIS)*. June, 5–7.
- Goleman. (2019). Pengaruh Probit Audit Dan Pengendalian Internal Terhadap Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022a). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022b). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat*.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Indarti, R. D., & Arisyahidin. (2024). Implementasi Enterprise Risk Management pada Proyek-Proyek Strategis Daerah oleh Inpektorat Daerah Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 13(2), 37–48.
- Inspektorat DIY. (2020). *Tugas, Fungsi, dan Peran APIP Sesuai Permendagri*. <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/>
- Inspektorat DIY. (2024). *Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KPTS/2024 Tentang Penilaian Risiko pada Inspektorat Daerah Istimewa*

Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

- KemenPAN-RB. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- KPK. (2024). *Survei Penilaian Integritas*. Jaga.Id. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=46629675>
- Latuconsina, D. A., & Rahim, S. (2021). Pengaruh Brainstorming dan Fraud Risk Terhadap Deteksi Potensi Kecurangan Oleh Auditor. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(2), 219–233. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i2.1725>
- Lestari, F., & Mayangsari, S. (2023). Enterprise Risk Management dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan di Parlemen Indonesia. *APSSAI Accounting Review*, 3(2), 176–197. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i2.89>
- Misra, I., Hakim, S., & Pramana, A. (2020). Manajemen Risiko (Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah). In A. Sadikin (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. K-Media.
- Mulqiani, D. (2021). *Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud di Lingkungan Pemerintahan (Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36547>
- Oydog, H. E., & Senvar, O. (2020). General Overview to Enterprise Risk Management With Its Key Components and Determinants From the Management Perspectives. *IGI Global*, 289–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1033-9.CH013>
- Pane, I., Hadju, V. A., Maghfuroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Lestari, Z. W., Galih, A. P., Wijayanto, P. W., Waluyo, Uslan, & Aulia, U. (2021). *Desain Penelitian Mixed Method* (N. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Park, K., Qin, J., Seidel, T. A., & Zhou, J. (2019). *Does Prompt Compliance with the COSO 2013 Framework Signal a Commitment to a Strong Internal Control Environment*. <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/64899>
- Putri, L. P. (2018). *Penerapan Manajemen Risiko Strategi pada Ijarah Multijasa*. 1–100.
- Risky, S. A., Abdurrahman, L., & Santoso, A. F. (2024). *Evaluasi Enterprise Risk Management pada Lembaga XYZ dengan Menggunakan Framework SPBE pada Daftar Risiko Nomor 10-12, 26-28, dan 65-75*. 11(4), 26–28.
- Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 133. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.377>
- Sakrabani, P., & Ping, T. A. (2022). Enterprise Risk Management: a Review of Two Decades. *Journal of Information System and Technology Management*, 7(27), 76–84. <https://doi.org/10.35631/jistm.727006>
- Santana, S., Muttaqin, I. K., Vrij, L. A. C., Asivadibrata, A., Kamaludin, N. F., Aulia, A. G., & Maesaroh, S. S. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada UMKM Tasikmalaya (Studi Kasus UMKM Mie Baso Sarirasa

- 81). *Jurnal Bina Manajemen*, 11(2), 60–75.
<https://doi.org/10.52859/jbm.v11i2.309>
- Sari, T. P., & Lestari, D. I. T. (2020). Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud : Perspektif Diamond Fraud Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 109–125. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.618>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (A. Nuryanto (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Tarjo, T., Vidyantha, H. V., Anggono, A., Yuliana, R., & Musyarofah, S. (2022). The Effect of Enterprise Risk Management on Prevention and Detection Fraud in Indonesia's Local Government. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2101222>
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya. (2020). Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.55748/bjel.v1i2.35>
- Wade-Berg, J. A. (2022). *Observation* (pp. 365–375). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_25

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian (Kuesioner Penelitian)

Untuk bagian berikut di bawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda pada (□) atau dengan mengisi tempat yang telah tersedia.

Bagian 1	Profil Responden
-----------------	-------------------------

Karakteristik Individu

1. Jenis Kelamin : Pria Wanita

2. Usia : < 20 Tahun 40-49 Tahun
 20-29 Tahun >49 Tahun
 30-39 Tahun

3. Pendidikan : Diploma 3 (D3) Strata 2 (S2)
 Diploma 4 (D4) Strata 3 (S3)
 Strata 1 (S1)
 Lainnya (Sebutkan)

4. Pengalaman Kerja : < 5 Tahun 11-15 Tahun
 6-10 Tahun >15 Tahun

5. Jabatan :

Pada bagian 2 dan 3 silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)

Untuk bagian berikut di bawah ini, silakan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) untuk jawaban yang paling sesuai menurut anda pada (□) atau dengan mengisi pada tempat yang telah tersedia.

Bagian 2

A. Pernyataan Tentang Penerapan Pengelolaan Risiko (ERM) dan Efektivitasnya

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
I. Lingkungan Internal (<i>Internal Environment</i>)		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Nilai-nilai integritas dan etika telah ditanamkan dan dipahami oleh seluruh pegawai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Struktur organisasi mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Terdapat komitmen dan keteladanan pimpinan terkait prinsip integritas dan transparansi dalam pengelolaan risiko kecurangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II. Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
4	Tujuan organisasi telah ditetapkan secara jelas dan terukur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Inspektorat DIY secara berkala mengidentifikasi potensi risiko kecurangan atas peristiwa eksternal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Inspektorat DIY secara berkala mengidentifikasi potensi risiko kecurangan atas peristiwa internal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7	Setiap unit kerja didorong untuk melaporkan indikasi risiko <i>fraud</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Risiko kecurangan dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Penilaian risiko dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>)		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
10	Kebijakan-kebijakan di Inspektorat DIY telah efektif dalam merespons risiko yang terjadi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Prosedur pengendalian internal dijalankan secara konsisten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Prosedur-prosedur di Inspektorat DIY telah efektif dalam merespons risiko yang terjadi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Terdapat mekanisme yang mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan anti- <i>fraud</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV. Informasi dan Komunikasi (<i>Information & Communication</i>)		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
14	Informasi terkait risiko kecurangan disampaikan secara terbuka dan tepat waktu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Informasi yang dikomunikasikan bersifat relevan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V. Pemantauan (<i>Monitoring</i>)		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
16	Proses pengelolaan risiko dikaji ulang dan diperbarui secara berkala.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Evaluasi terhadap pengendalian risiko dilakukan secara objektif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Inspektorat DIY melakukan tindak lanjut atas kekurangan dalam proses pengelolaan risiko berdasarkan hasil evaluasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bagian 3

B. Pernyataan Tentang Persepsi Umum Responden

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
Persepsi Umum Responden		1	2	3	4	5
1	Saya merasa sistem pengelolaan risiko saat ini mampu mencegah kecurangan secara efektif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Penerapan ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saya mendukung penerapan ERM (<i>Enterprise Risk Management</i>) secara menyeluruh di lingkungan kerja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lampiran 2: Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)

HASIL WAWANCARA I

Hari/Tanggal : 24 Januari 2025
Durasi Waktu Wawancara : 25 menit
Narasumber : Sekretaris Inspektorat DIY

1. Apakah tim pengelola risiko secara rutin melakukan identifikasi risiko? Jika ya, seberapa sering identifikasi ini dilakukan?

Identifikasi risiko dilakukan sekali pada akhir tahun sebelumnya atau maksimal di awal tahun anggaran berjalan.

2. Apakah ada contoh risiko yang berhasil dimitigasi secara efektif? Bagaimana cara mengukur keberhasilannya?

Contoh risiko : suap/gratifikasi oleh auditi kepada tim audit. Mitigasinya berupa melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja, melakukan evaluasi atas kepuasan pemangku kepentingan secara berkala dan memuat pernyataan/pertanyaan terkait praktek suap dan gratifikasi dan melakukan sosialisasi kode etik APIP kepada seluruh pegawai. Cara mengukur mitigasi tersebut menggunakan form evaluasi atas kepuasan pemangku kepentingan/auditi termasuk didalamnya terdapat pertanyaan terkait suap dan gratifikasi kepada tim pemeriksa, dan hasilnya tidak ditemukan praktek suap dan gratifikasi kepada tim pemeriksa.

3. Apakah tim pengelola risiko mengikuti prosedur pengelolaan risiko kecurangan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan? Jika ya, bagaimana proses pengawasan terhadap kepatuhan ini?

Tim pengelola risiko melaksanakan prosedur pengelolaan risiko kecurangan meliputi pertemuan dengan Pemilik Risiko dan counterpart (membahas teknis pelaksanaan FRA), mempelajari dan memahami sistem manajemen risiko organisasi, mempelajari dan memahami strategi pengendalian kecurangan terpasang (existing), identifikasi risiko-risiko kecurangan, proses penilaian tingkat kemungkinan dan dampak risiko kecurangan, menentukan respon atas masing-masing risiko kecurangan, Tim FCP melakukan verifikasi hasil penilaian risiko kecurangan, Tim FCP, Pemilik Risiko, dan Tim Counterpart

(pengelola risiko) melakukan analisis untuk menyusun Profil Risiko Kecurangan. Proses pengawasan dilakukan secara internal oleh manajemen mandasikan pada Keputusan Inspektur tentang Tim Manajemen Risiko dan juga oleh Tim Pendamping MR.

4. Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana prosedur pengelolaan risiko kecurangan tidak diikuti dan bagaimana hal tersebut ditangani?

Contohnya, ketika proses FGD dalam rangka verifikasi hasil penilaian risiko kecurangan tidak dilakukan, maka hasil penilaian risiko tersebut tidak terkomunikasikan secara menyeluruh kepada seluruh pemilik risiko. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap risiko kecurangan itu sendiri. Akibatnya, informasi yang seharusnya menjadi dasar untuk tindakan pengendalian tidak tersampaikan secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan reviu secara berkala untuk menilai apakah mitigasi risiko yang ada sudah efektif atau justru perlu dilakukan modifikasi terhadap mitigasi yang telah disusun.

5. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan kasus kecurangan di sini?

Terdapat tim khusus (Tim Whistleblowing System) yang menangani pengaduan masyarakat termasuk kecurangan / fraud melalui system pengaduan WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi.

HASIL WAWANCARA II

Hari/Tanggal : 24 Januari 2025
 Durasi Waktu Wawancara : 20 menit
 Narasumber : Kepala Subbagian Program dan Monev

1. Apakah tim pengelola risiko secara rutin melakukan identifikasi risiko? Jika ya, seberapa sering identifikasi ini dilakukan?

Tim Pengelola Risiko Inspektorat DIY melakukan identifikasi risiko pada jangka waktu akhir Tahun anggaran berjalan s.d. awal tahun berikutnya. Hasil akhirnya berupa SK Manajemen Risiko yang ditandatangani Inspektur

2. Apa metode atau alat yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan?

Pada awal Disusunnya MR Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan metode Brainstroming Sessions dengan tahap awal dilaksanakan oleh pemilik risiko di Inspektorat dilanjutkan dengan Brainstroming bersama dengan Tim Pendamping MR Inspektorat DIY, di tahun-tahun berikutnya dengan metode yang sama dilakukan pemutakhiran terkait risiko yang masih relevan ataupun yang sudah tidak relevan bagi organisasi (Inspektorat).

3. Bagaimana Anda menilai efektivitas dari tindakan mitigasi tersebut? Apakah ada indikator khusus yang digunakan?

Inspektorat melakukan monitoring internal setiap triwulan dengan dalam bentuk laporan risk event yang berisi kejadian risiko, uraian, dan langkah penanganan dan keterangan lain yang diperlukan.

4. Apa saja yang menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan monitoring dan evaluasi?

Fokus utama dalam monev kejadian risiko (risk event), uraian, langkah penanganan dan keterangan lain yang diperlukan serta pelaksanaan atas mitigasi / respon terhadap risiko kecurangan.

5. Apakah hasil monitoring dan evaluasi secara rutin dilaporkan kepada manajemen? Jika ya, bagaimana laporan tersebut digunakan?

Secara triwulanan dilakukan monev yang dilaporkan kepada manajemen. Laporan yang disampaikan dimanfaatkan untuk melihat apabila risiko terjadi apakah rencana mitigasi yang dirancang mampu mengatasi keterjadian risiko, yang kemudian digunakan sebagai masukan dalam perbaikan atau untuk mengidentifikasi risiko kecurangan di tahun berikutnya.

HASIL WAWANCARA III

Hari/Tanggal : 24 Januari 2025
 Durasi Waktu Wawancara : 20 menit
 Narasumber : Pengelola Pengawasan

1. Apakah tim pengelola risiko secara rutin melakukan identifikasi risiko? Jika ya, seberapa sering identifikasi ini dilakukan?

Iya, setahun sekali ditambah dengan monitoring dan pelaporan setiap triwulan.

2. Bagaimana proses validasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi? Apakah ada verifikasi oleh pihak lain atau melalui audit?

Proses validasi terhadap risiko yang telah teridentifikasi ditetapkan dengan SK Inspektur atas Penilaian Risiko. Kemudian dilakukan pendampingan oleh Tim Pendampingan Manajemen Risiko yang beranggotakan Auditor dan PPUPD.

3. Bagaimana Anda menilai efektivitas dari tindakan mitigasi tersebut? Apakah ada indikator khusus yang digunakan?

Suap/gratifikasi oleh auditi kepada tim audit dinilai dari kemauan pelaporan kejadian gratifikasi yang ada oleh pegawai dan kenaikan nilai survey kepuasan masyarakat. Sedangkan penyalahgunaan/penggelapan aset Inspektorat dinilai dengan adanya pemutakhiran Kartu Inventaris Barang (KIR) secara berkala dapat diketahui kondisi barang secara lebih up to date.

4. Apakah Anda melihat penurunan jumlah kasus kecurangan sejak penerapan pengelolaan risiko kecurangan? Jika ya, bisa Anda jelaskan penurunannya dalam beberapa tahun terakhir?

Iya, pegawai dengan kesadaran sendiri melaporkan dan berani menolak gratifikasi, Instansi juga memberikan penghargaan kepada pelapor kecurangan. Tidak adanya aduan/keluhan akan pemerasan dari Instansi yang diperiksa (obyek pemeriksaan/ obrik) Inspektorat atas pemeriksa yang ditugaskan. Terdapat peningkatan Nilai survei kepuasan masyarakat.

5. Apa faktor utama yang menurut Anda berkontribusi pada penurunan tersebut?

Sosialisasi anti kecurangan berkala; Pedoman yang jelas dalam penanganan risiko; faktor penghargaan dan hukuman; komitmen petinggi instansi yang disuarakan dan dilakukan secara riil (baik lisan maupun perilaku); dukungan tim pendampingan yang benar-benar mengerti manajemen risiko; kerjasama kegiatan pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dukungan riil pemerintah pusat baik segi kebijakan maupun anggaran.

Lampiran 3: Hasil Pengolahan Data Statistik (SPSS)

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	26	48.1	48.1	48.1
	Perempuan	28	51.9	51.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29 tahun	7	13.0	13.0	13.0
	30-39 tahun	10	18.5	18.5	31.5
	40-49 tahun	23	42.6	42.6	74.1
	>49 tahun	14	25.9	25.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma 3 (D3)	3	5.6	5.6	5.6
	Diploma 4 (D4)	3	5.6	5.6	11.1
	Strata 1 (S1)	29	53.7	53.7	64.8
	Strata 2 (S2)	15	27.8	27.8	92.6
	Lainnya	4	7.4	7.4	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Pengalaman Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 tahun	5	9.3	9.3	9.3
	6-10 tahun	10	18.5	18.5	27.8
	11-15 tahun	21	38.9	38.9	66.7
	>15 tahun	18	33.3	33.3	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PPUPD	9	16.7	16.7	16.7
	Auditor	29	53.7	53.7	70.4
	Pelaksana	16	29.6	29.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Nilai-Nilai Integritas dan Etika Telah Ditanamkan dan Dipahami Oleh Seluruh Pegawai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	34	63.0	63.0	64.8
	Sangat Setuju	19	35.2	35.2	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Struktur Organisasi Mendukung Penerapan Manajemen Risiko Secara Efektif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	40	74.1	74.1	75.9
	Sangat Setuju	13	24.1	24.1	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Terdapat Komitmen dan Keteladanan Pimpinan Terkait Prinsip Integritas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Risiko Kecurangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	35	64.8	64.8	68.5
	Sangat Setuju	17	31.5	31.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Tujuan Organisasi Telah Ditetapkan Secara Jelas dan Terukur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	37	68.5	68.5	68.5
	Sangat Setuju	17	31.5	31.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Inspektorat DIY Secara Berkala Mengidentifikasi Potensi Risiko Kecurangan atas Peristiwa Eksternal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	43	79.6	79.6	81.5
	Sangat Setuju	10	18.5	18.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Inspektorat DIY Secara Berkala Mengidentifikasi Potensi Risiko Kecurangan atas Peristiwa Internal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	43	79.6	79.6	81.5
	Sangat Setuju	10	18.5	18.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Setiap Unit Kerja Didorong Untuk Melaporkan Indikasi Risiko Fraud

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	39	72.2	72.2	75.9
	Sangat Setuju	13	24.1	24.1	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Risiko Kecurangan Dianalisis Berdasarkan Kemungkinan dan Dampaknya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	41	75.9	75.9	77.8
	Sangat Setuju	12	22.2	22.2	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Penilaian Risiko Dilakukan Secara Sistematis dan Terdokumentasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	46	85.2	85.2	87.0
	Sangat Setuju	7	13.0	13.0	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Kebijakan-Kebijakan di Inspektorat DIY Telah Efektif Dalam Merespons Risiko yang Terjadi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	43	79.6	79.6	81.5
	Sangat Setuju	10	18.5	18.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Prosedur Pengendalian Internal Dijalankan Secara Konsisten

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	45	83.3	83.3	87.0
	Sangat Setuju	7	13.0	13.0	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

**Prosedur-Prosedur di Inspektorat DIY Telah Efektif Dalam
Merespons Risiko yang Terjadi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1.9	1.9	1.9
	Setuju	44	81.5	81.5	83.3
	Sangat Setuju	9	16.7	16.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

**Terdapat Mekanisme yang Mengawasi Kepatuhan Terhadap
Kebijakan Anti-Fraud**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	39	72.2	72.2	75.9
	Sangat Setuju	13	24.1	24.1	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

**Informasi Terkait Risiko Kecurangan Disampaikan Secara Terbuka
dan Tepat Waktu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	8	14.8	14.8	14.8
	Setuju	38	70.4	70.4	85.2
	Sangat Setuju	8	14.8	14.8	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Informasi yang Dikomunikasikan Bersifat Relevan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	9.3	9.3	9.3
	Setuju	38	70.4	70.4	79.6
	Sangat Setuju	11	20.4	20.4	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Proses Pengelolaan Risiko Dikaji Ulang dan Diperbarui Secara Berkala

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	44	81.5	81.5	85.2
	Sangat Setuju	8	14.8	14.8	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Evaluasi Terhadap Pengendalian Risiko Dilakukan Secara Objektif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	40	74.1	74.1	77.8
	Sangat Setuju	12	22.2	22.2	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Inspektorat DIY Melakukan Tindak Lanjut atas Kekurangan Dalam Proses Pengelolaan Risiko Berdasarkan Hasil Evaluasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	3.7	3.7	3.7
	Setuju	44	81.5	81.5	85.2
	Sangat Setuju	8	14.8	14.8	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Saya Merasa Sistem Pengelolaan Risiko Saat Ini Mampu Mencegah Kecurangan Secara Efektif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	7.4	7.4	7.4
	Setuju	41	75.9	75.9	83.3
	Sangat Setuju	9	16.7	16.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

**Penerapan ERM Telah Membantu Meningkatkan Transparansi dan
Akuntabilitas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	7.4	7.4	7.4
	Setuju	38	70.4	70.4	77.8
	Sangat Setuju	12	22.2	22.2	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

**Saya Mendukung Penerapan ERM Secara Menyeluruh di
Lingkungan Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	3	5.6	5.6	5.6
	Setuju	40	74.1	74.1	79.6
	Sangat Setuju	11	20.4	20.4	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Lampiran 5: Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 1975/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2025

Bismillaahirrahmaanirrahüm.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Rizma Drajad Siti Apriyanti**
 Nomor Mahasiswa : **21213011**
 Dosen Pembimbing : **Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev.**
 Program Studi : **Analisis Keuangan**
 Judul Karya Ilmiah : **Evaluasi Pengelolaan Risiko Kecurangan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Indikator Enterprise Risk Management**
 Nomor Hp : **081556803850**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **7% (tujuh persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi, S.IP., M.IP.

Lampiran 6: Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Rizma Drajad Siti Apriyanti
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 10 April 2003
 Alamat : Dusun Krajan, RT 005/RW 001, Tempeh Lor,
 Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang,
 Jawa Timur
 Nomor Telepon : 081556803850
E-Mail : rizmadrajad04@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : SMA Negeri 2 Lumajang
 SMP Negeri 1 Tempeh
 Pengalaman Organisasi : Marketing and Communication Sarjana Terapan
 FBE UII
 Koperasi Mahasiswa UII
 Prestasi : Silver Medal INDES (2024)
 Juara 1 BIC Banker's Day (2023)
 Juara 4 Essay Competition ISM IBSI (2023)
 Best International Innovation INDES (2023)
 Juara 1 PKM-GFT FBE UII (2022)
 Juara 2 Essay Competition Banker's Day (2022)
 Juara 2 LKTI HMST FBE UII (2022)
 Silver Medal INDES (2022)
 Juara 3 Olimpiade Vokasi Indonesia (2022)
 Juara 2 LKTI Universitas Negeri Malang (2022)